

## **ABSTRACT**

This thesis aims to explain the Regulatory Protectionism, which was carried out by Indonesia in the case of Brazil imported meat restrictions in the WTO from 2014 to 2017. The guilty decision handed down by the WTO Dispute Resolution Body to Indonesia proved to have strong justifications. Based on the findings, there is a positive relationship between the three disputed aspects of Indonesian import regulation, with protectionism indicators based on the concept of Regulatory Protectionism. The concept of Regulatory Protectionism in this thesis also explains the political motivation and implications behind states decision to implement their act of Regulatory Protectionism. Political decisions to commit and be incorporated into free trade regimes that have eliminated traditional protectionism options, as well as the ease to utilize the loopholes in the "right to regulate" principle and other agreements/principles in the WTO; are the two reasons that motivate states to carry out acts of Regulatory Protectionism, based on the findings. Finally, this thesis also sees the political implications of this case, which is the urgency for the WTO as the largest institution in the global free trade regime, to evaluate the loopholes it has in order to avoid utilization by countries to implement their protectionistic regulations.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proteksionisme dengan menggunakan instrumen regulasi (*Regulatory Protectionism*), yang dilakukan oleh Indonesia dalam kasus restriksi daging impor Brasil di WTO tahun 2014 hingga 2017. Keputusan bersalah yang dijatuhkan Badan Penyelesaian Sengketa WTO terhadap Indonesia, terbukti memiliki justifikasi kuat. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat relasi positif antara tiga aspek regulasi Indonesia yang disengketakan, dengan indikator-indikator proteksionisme berdasarkan konsep *Regulatory Protectionism*. Konsep *Regulatory Protectionism* dalam penelitian ini juga menjelaskan motivasi dan implikasi politik di balik tindak *Regulatory Protectionism* negara itu sendiri. Keputusan politik untuk tergabung dalam rezim perdagangan bebas yang membuat opsi proteksionisme tradisional terhapuskan, serta kemudahan untuk mengutilisasi celah dalam asas *right to regulate* dan kesepakatan/prinsip lainnya dalam WTO; menjadi dua alasan yang memotivasi negara untuk melakukan tindak *Regulatory Protectionism*. Sehingga akhirnya, penelitian juga melihat implikasi politik berupa urgensi bagi WTO selaku institusi terbesar dalam rezim perdagangan bebas global, untuk melakukan evaluasi terhadap celah-celah yang dimilikinya guna menghindari utilisasi oleh negara-negara yang ingin melakukan proteksi.